

**FAKTOR PENDORONG INISIATIF ADOPSI *OPEN GOVERNMENT*  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA  
DALAM PROVINSI DI PULAU JAWA**

**Fatma Yunita Aprilia<sup>1</sup>, Diah Hari Suryaningrum<sup>2</sup>**  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1,2</sup>  
[diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id](mailto:diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong inisiatif adopsi open government di pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi penelitian meliputi seluruh kota dan kabupaten di Pulau Jawa, dan sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan total 113 kota dan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap bagaimana pemerintah daerah menyediakan akses ke website mereka, sedangkan fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap cara pemerintah daerah menyediakan akses ke website mereka. Simpulan, penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan hak mendapatkan informasi publik serta memperkuat fasilitas akses data informasi publik sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

**Kata Kunci:** Informasi Publik, Open Government, Satu Data, Website

**ABSTRACT**

*This research aims to examine and analyze the factors that encourage open government adoption initiatives in district and city governments in provinces on the island of Java. The research method used is a quantitative method with multiple linear regression analysis to analyze the relationship between the variables studied. The research population covers all cities and regencies on the island of Java, and the research sample was taken by purposive sampling with a total of 113 cities and regencies. The research results show that taxes paid by the public have a positive influence on how local governments provide access to their websites, while political fragmentation has a negative influence on how local governments provide access to their websites. In conclusion, this research emphasizes the importance of cooperation between the community and government to increase awareness of the right to obtain public information and strengthen data access facilities for public information as a form of commitment to realizing open government.*

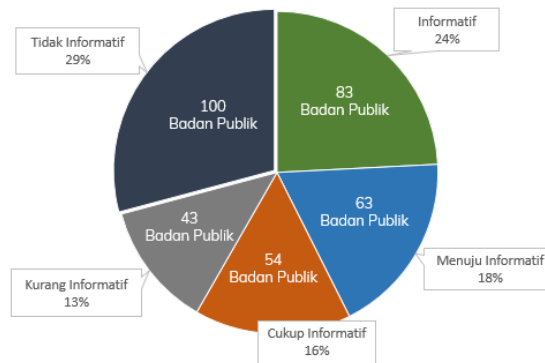
**Keywords:** Public Information, Open Government, One Data, Website

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 1990-an *New Public Management* mulai dikenalkan sebagai dampak dari protes masyarakat atas manajemen organisasi sektor publik yang dianggap tidak

lebih baik dari sektor swasta. Pandangan mengenai *New Public Management* menghendaki bahwa penggunaan informasi dan teknologi komunikasi akan meningkatkan efisiensi, kebijakan yang efektif, dan nilai-nilai demokrasi (OECD, 2016). Perkembangan teknologi informasi yang pesat menciptakan kemudahan akses informasi oleh setiap orang tidak terkecuali kebutuhan akses informasi milik sektor publik. Keterbukaan informasi sektor publik menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Di Indonesia, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik dibuktikan dengan turut sertanya Indonesia menjadi salah satu pencetus berdirinya *Open Government Partnership (OGP)*. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan delapan negara lain menandatangani Deklarasi OGP pada September 2011 (OECD, 2016). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menggiatkan praktik keterbukaan pemerintah dengan membuat kebijakan yang transparan dan melibatkan peran aktif warga negara. Di Indonesia, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik dibuktikan dengan turut sertanya Indonesia menjadi salah satu pencetus berdirinya *Open Government Partnership (OGP)*. Selaku pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melakukan pengamatan dan penilaian mengenai keterbukaan informasi milik badan publik. Menurut Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021, hasil dari pengamatan dan penilaian terhadap keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam Diagram 1.



**Diagram 1.** Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022  
 Sumber: Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021

Berdasarkan Diagram 1, keterbukaan informasi milik 100 Badan Publik masih tergolong tidak informatif. Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal. Berdasarkan Luthfia dkk., (2021) setidaknya terdapat empat hambatan penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hambatan tersebut yaitu kurangnya komitmen keterbukaan oleh pemerintah, birokrasi yang tidak fleksibel, dan budaya organisasi yang tidak terbiasa membuka informasi kepada publik. Masyarakat juga dinilai kurang sadar atas hak untuk mengakses informasi publik. Komitmen pengungkapan informasi kepada publik juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas informasi dalam situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan Marthasari & Ismadiani (2020) kinerja situs resmi pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar termasuk ke dalam kategori sedang. Akan tetapi pada kenyataannya, situs resmi pemerintah daerah sering kali tidak bisa diakses atau

menunjukkan keamanan halaman situs tidak aman atau berbahaya, tampilan grafik yang tidak menarik serta tautan yang tidak clickable. Yuhertiana dkk. (2020) website kementerian keuangan serta auditor pemerintahan di beberapa negara tidak dapat diakses dalam mesin pencarian Google. Situs website pemerintah daerah juga sedikit yang menyajikan laporan keuangan daerahnya. Oleh karena hambatan tersebut, seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi publik (Shadrina & Hidajat, 2023).

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif *Open Government* menjadi penting untuk memastikan arah kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Peneliti tertarik meneliti faktor-faktor yang menjadi pendorong inisiatif *Open Government* dalam segi demografi, ekonomi, politik, dan profil kota pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan variabel seperti persepsi pengguna informasi publik, kualitas informasi, budaya organisasi, dan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Sementara pada penelitian ini akan lebih fokus pada keempat faktor yaitu demografi, ekonomi, politik, dan profil kota. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dari segi demografi, ekonomi, politik, dan profil kota yang menjadi pendorong inisiatif adopsi *open government* pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berada dalam provinsi di Pulau Jawa.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder bertujuan untuk membantu manajemen meningkatkan nilai entitas nya. Nilai suatu entitas meningkat karena sebagai akibat dari kegiatan yang dioperasikan serta memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul bagi stakeholder. Dalam teori stakeholder juga disebutkan bahwa untuk menambah tingkat keberhasilan usaha dan akuntabilitas, organisasi harus memperhatikan kepentingan para pemangku (Suharyani et al., 2019).

Menurut Rose dkk., (2018) setiap organisasi memiliki pemangku keputusan yang harus diakui dan dihormati oleh manajer organisasi tersebut. Pemenuhan kepentingan para stakeholder dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan demi keberlanjutan kegiatan sebuah organisasi (Tampubolon & Siregar, 2019). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, stakeholders atau pemangku kepentingan dalam konteks instansi pemerintah adalah pihak di dalam atau di luar instansi pemerintah yang memiliki kepentingan serta dapat mempengaruhi kinerja instansi tersebut yang dapat meningkatkan tata kelola menjadi lebih baik. Contoh stakeholder internal instansi pemerintah adalah pimpinan, pegawai, pegawai tidak tetap, pensiunan, dan alih daya. Sementara itu, contoh stakeholder eksternal instansi pemerintah adalah media, komunitas, masyarakat, dan kelompok UMKM.

### **Teori Institusional**

Di Maggio & Powell (1983) dalam (Marthasari & Ismadianti2020) menjelaskan bahwa teori institusional menganggap desain dari sebuah organisasi merupakan proses yang dikondisikan oleh faktor internal dan eksternal yang mengarahkan organisasi memiliki karakteristik yang sama. Teori institusional memandang organisasi yang mengutamakan legitimasi cenderung menyamakan kegiatan organisasinya berdasarkan kehendak sosial disekitarnya (Karina et al., 2019). Teori institusional merupakan teori

yang menjelaskan bagaimana karakteristik suatu organisasi memiliki kesamaan dengan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi dalam lingkungan yang sama cenderung akan memiliki karakteristik yang serupa. Organisasi akan mengarahkan kegiatannya agar sesuai dengan harapan sosial di sekitarnya. Upaya menyesuaikan harapan sosial dapat menyebabkan organisasi untuk patuh kepada peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kesamaan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya.

### **Teori Penetapan Tujuan**

Teori penetapan tujuan merupakan satu diantara teori yang paling kuat dalam penelitian motivasi kerja, menjelaskan bagaimana karakteristik tujuan mempengaruhi kinerja melalui mekanisme fokus perhatian, usaha, ketekunan, dan pengembangan strategi (Diefendorff & Seaton, 2015). Teori Penetapan Tujuan tidak hanya berlaku bagi individu, namun juga berlaku pada kelompok atau team (van der Hoek et al., 2018). Berdasarkan teori ini, pegawai dalam team akan memiliki kinerja lebih baik apabila tujuan yang memandu pekerjaan ditetapkan dengan jelas, spesifik, dan menantang dibanding dengan tujuan yang tidak jelas, ambigu, dan tidak menantang (Locke & Latham, 2015; Triani, 2018). Teori ini menunjukkan bahwa organisasi menetapkan komitmen demi mencapai tujuan sehingga akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kegiatan pada organisasi akan lebih terarah dan terstruktur apabila tujuan organisasi tersebut telah ditetapkan dengan jelas.

### **Faktor Demografi**

Berdasarkan teori stakeholder, instansi publik seharusnya menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya dengan menunjang kebutuhan stakeholder serta memberikan keterbukaan informasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan nilai dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah (Triani, 2018). Alcaide Muñoz dkk., (2016) berpendapat bahwa daerah dengan populasi tinggi memiliki sumber daya manusia yang lebih berlimpah, pemanfaatan teknologi yang lebih handal, dan sumber keuangan yang lebih tinggi untuk mendorong inisiatif akses dan pengungkapan informasi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintah sektor publik. Berdasarkan hal tersebut, daerah yang memiliki lebih banyak jumlah penduduk akan lebih memiliki kekuatan untuk menekan pemerintahnya melakukan keterbukaan informasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan prinsip *Open Government*, upaya pengungkapan informasi juga akan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam siklus kebijakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif dari jumlah populasi terhadap cara akses dan pengungkapan informasi di situs resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

DiMaggio & Powell (1983) dalam Marthasari & Ismadiani (2020) menjelaskan bahwa teori institusional menganggap desain dari sebuah organisasi merupakan proses yang dikondisikan oleh faktor internal dan eksternal yang mengarahkan organisasi untuk memiliki kemiripan karakteristik seiring berjalannya waktu. Sementara itu, perbedaan pengambilan keputusan suatu pemerintah daerah dengan daerah lain misalnya dalam keputusan pengungkapan informasi terjadi karena perbedaan cara klasifikasi, rutinitas, wacana, dan skema (Kisworo & Shauki, 2019). Homsy & Warner (2014) menjelaskan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menuntut pemerintah daerahnya untuk lebih transparan. Semakin padatnya penduduk suatu daerah maka akan terbentuk interaksi yang mengalirkan baik pengetahuan

maupun ide inovasi (Glaeser & Gottlieb, 2016). Inovasi inilah yang menjadi katalisator kebijakan *Open Government*. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif dari kepadatan penduduk terhadap cara akses dan pengungkapan informasi di situs resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022).

### **Faktor Ekonomi**

Muñoz dkk. (2022) menjelaskan bahwa daerah dengan masyarakat berpendapatan tinggi akan lebih menuntut pemerintah lebih transparan karena semakin banyak penghasilan yang diterima, maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin tinggi. Naiknya pajak yang dibayarkan sejalan dengan tingkat pendapatan yang diterima dikarenakan oleh diterapkannya tarif pajak progresif pada Pajak Penghasilan di Indonesia (Perdana, 2018). Masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi akan lebih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Sáez-Martín dkk. (2021) menyatakan bahwa status ekonomi masyarakat mempengaruhi secara positif terhadap pengungkapan informasi keuangan publik sehingga menciptakan transparansi yang merupakan salah satu prinsip kebijakan *Open Government*.

Alcaide Muñoz dkk. (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak yang dibayar oleh masyarakat, semakin tinggi pula permintaan masyarakat akan keterbukaan informasi untuk mengamati keputusan politik dan investasi sumber daya publik. Masyarakat akan lebih mudah memantau bagaimana pajak yang telah dibayarkan dikelola oleh pemerintah melalui pengungkapan informasi keuangan (Yuhertianaa et al., 2019). Pengungkapan informasi keuangan inilah yang mendorong pemerintah dalam menerapkan salah satu prinsip kebijakan *Open Government* yaitu transparansi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan tekanan fiskal berpengaruh positif terhadap cara akses dan pengungkapan informasi di situs resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022).

### **Faktor Politik**

Berdasarkan teori stakeholder, instansi publik seharusnya menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya dengan menunjang kebutuhan stakeholder serta memberikan keterbukaan informasi. Fragmentasi politik menurut Alcaide Muñoz dkk. (2016) dan Rodríguez Bolívar dkk. (2013) dapat mempengaruhi insentif pemerintah dalam menawarkan transparansi informasi. Penelitian yang dilakukan keduanya menunjukkan semakin banyak jumlah partai politik dalam suatu pemerintahan, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan ke publik. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta menerapkan salah satu prinsip kebijakan *Open Government* yaitu transparansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 dalam lingkup pemerintah daerah, DPRD adalah lembaga yang mewakili masyarakat daerah bertugas untuk membuat perda bersama kepala daerah. Peraturan inilah yang menjadi pemandu pekerjaan pegawai pemerintah. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang dicalonkan oleh Partai Politik. Pada pemilu tahun 2019, jumlah partai politik yang turut serta sebagai peserta pemilu mencapai 20 partai politik (Bawaslu Manado, 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rodríguez Bolívar dkk. (2013) dan Alcaide Muñoz dkk. (2016) menjelaskan pengaruh negatif kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan publik. Semakin banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu, maka semakin tinggi pemerintah akan membuka informasi publik demi mendapatkan citra yang baik bagi pemilih.

Landasan teori dalam menarik hipotesis terkait pengaruh stabilitas politik dengan inisiatif adopsi *Open Government* adalah teori penentuan tujuan. Teori Penetapan Tujuan tidak hanya berlaku bagi individu, namun juga berlaku pada kelompok atau team (van der Hoek et al., 2018). Alcaide Muñoz dkk. (2016) menemukan hubungan positif yang signifikan antara masa jabatan seorang politisi dengan keuangan berkelanjutan di suatu daerah. Politisi dengan masa jabatan lebih lama memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dalam menentukan tujuan secara rasional (Jochimsen & Thomasius, 2014). Dalam konteks pemerintah daerah kabupaten/kota, politisi yang dimaksud adalah bupati/walikota. Bupati/walikota pasti memiliki program kerja selama masa jabatannya. Akan tetapi karena dibatasinya masa jabatan seorang kepala daerah, program kerja tersebut bisa saja belum terimplementasi dengan baik sampai akhir masa jabatannya. Kepala daerah baru belum tentu bersedia meneruskan program kerja tersebut, sehingga kepala daerah dengan jabatan yang lebih lama akan dapat menetapkan tujuan yang rasional serta mencapainya.

### **Faktor Profil Kota**

Rodríguez Bolívar (2019) menjelaskan bahwa *smart city* mendorong pengembangan teknologi dan inovasi, menciptakan partisipasi masyarakat dan lingkungan yang kolaboratif antara pemerintah dan warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Daerah yang termasuk *smart city* cenderung akan lebih memanfaatkan teknologi informasi yang sudah sangat berkembang. Daerah yang termasuk *smart city* akan lebih tertarik dalam mencari informasi publik. Oleh karena itu, sikap ini dapat mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan *Open Government*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muñoz dkk. (2022) menunjukkan bahwa daerah yang termasuk *smart city*, maka pemerintah daerahnya lebih transparan dan mengungkap lebih banyak informasi publik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah cara akses *Open Government* yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa. Populasi dalam penelitian ini adalah kota dan kabupaten yang termasuk ke dalam provinsi yang berada di Pulau Jawa per tahun 2022 yaitu sebanyak 119 kota dan kabupaten. Sementara itu, penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria kota dan kabupaten yang termasuk ke dalam provinsi di Pulau Jawa per tahun 2022 yang memiliki anggota DPRD tingkat 2. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian dalam penelitian ini adalah sebanyak 113 sampel. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari masing-masing situs web Pemda dalam sampel, situs resmi Badan Pusat Statistik Pemda dalam sampel, portal data Kemenkeu <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, Surat Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, serta kanal YouTube Kemkominfo TV. Teknik analisis data dan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

**Tabel 1.**  
**Pengukuran Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Pengukuran Variabel</b>
Jumlah Populasi	Log natural jumlah populasi
Kepadatan Populasi	Jumlah populasi dibagi luas wilayah

Variabel	Pengukuran Variabel
PDRB per Kapita	PDRB dibagi jumlah penduduk
Pajak Daerah	Persentase pajak daerah dibagi PDRB
Fragmentasi Politik	Jumlah partai politik dengan kursi di DPRD
Stabilitas Politik	Lama jabatan kepala daerah secara berturut-turut
<i>Smart City</i>	0 = bukan termasuk <i>smart city</i> 1 = termasuk <i>smart city</i>
Cara Akses <i>Open Government</i>	Dideskripsikan pada Tabel 3

**Tabel 2.**  
**Pengukuran Variabel Cara Akses *Open Government***

Pertanyaan	Skor	Bobot
<b>SUB ITEM 1</b>		
Apakah pada website pemerintah daerah terdapat bagian khusus dari <i>open government</i> ?	$\sum a - d$	0,25
a. Terdapat bagian yang menghubungkan pada halaman yang berbeda pada <i>open government</i>	1	1
b. Terdapat <i>open government tab</i> , tapi di dalam website pemerintah daerah	0,5	0,50
c. Terdapat web sendiri tanpa penghubung dari official website pemerintah daerah	0,25	0,25
d. Tidak terdapat halaman <i>open government</i>	0	0,00
<b>SUB ITEM 2</b>		
Apakah halaman web memperbolehkan pencarian lebih dalam dari database <i>open government</i> ?	0/1	0,25
<b>SUB ITEM 3</b>		
Apakah pemerintah menawarkan informasi pada rencana kegiatan <i>open government</i> ?	0/1	0,25
<b>SUB ITEM 4</b>		
Apakah terdapat bagian berita?	0/1	0,25
<b>Total</b>		1

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 3.**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Mak	Rata-Rata	Std. Deviasi
Jumlah Populasi	113	11,7	15,53	13,8241	0,74652
Kepadatan Populasi	113	299,48	14680,94	2708,7642	3389,31247
PDRB per Kapita	113	18490	527925	53945,67	59203,676
Pajak Daerah	113	0,00090	0,01867	0,0049694	0,00339258
Fragmentasi Politik	113	0,11	0,37	0,2075	0,04659
Stabilitas Politik	113	1	13	5,92	2,213
<i>Smart City</i>	113	0	1	0,06	0,242
Cara Akses <i>Open Government</i>	113	0,25	0,46	0,2844	0,02937

Menunjukkan bahwa hasil nilai standar devisiasi variabel dependen yaitu cara akses *open government* adalah sebesar 0,02937. Rendahnya nilai devisiasi ini menunjukkan bahwa cara akses *open government* pada daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki skor yang hampir sama. Sementara itu, nilai devisiasi tinggi pada variabel kepadatan penduduk, PDRB per kapita, dan stabilitas politik menunjukkan bahwa sampel yang termasuk dalam penelitian ini adalah dari daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi hingga daerah dengan wilayah yang luas namun dengan kekayaan daerah yang lebih rendah. Hasil rata-rata variabel *smart city* memiliki nilai rendah karena daerah yang termasuk *smart city* hanya sebesar 5,31% dari keseluruhan sampel.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Regresi		Kesimpulan
	t	Sig	
Jumlah populasi	-0,875	0,384	H1 ditolak
Kepadatan penduduk	-0,243	0,809	H2 ditolak
PDRB per kapita	0,764	0,447	H3 ditolak
Pajak daerah	2,778	0,006	H4 diterima
Fragmentasi politik	-2,144	0,034	H5 diterima
Stabilitas politik	-1,195	0,235	H6 ditolak
<i>Smart city</i>	1,804	0,074	H7 ditolak

Menunjukkan nilai signifikansi variabel jumlah populasi adalah sebesar 0,384. Hasil tersebut menandakan bahwa H0 diterima yang berarti jumlah populasi tidak berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*. Nilai signifikansi variabel kepadatan penduduk adalah 0,809. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima, sehingga kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*.

## PEMBAHASAN

Nilai signifikansi pada hasil uji t variabel PDRB per kapita adalah 0,447, sehingga H0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*. Sementara itu, nilai signifikansi pada uji t variabel pajak yang dibayar masyarakat adalah 0,006. Hasil tersebut maka menandakan H4 diterima, sehingga dapat ditarik keputusan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*.

Hasil uji t pada variabel fragmentasi politik memiliki nilai signifikansi 0,034 maka H5 diterima. Oleh karena itu fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*. Sementara itu, nilai signifikansi pada uji t variabel stabilitas politik adalah 0,235. Hasil tersebut menandakan bahwa H0 diterima, sehingga stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*. Untuk hasil uji statistik t pada variabel *smart city* menunjukkan



hasil nilai signifikansi 0,074. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima, dengan demikian smart city tidak terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses *open government*.

Hasil dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Muñoz dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat berpengaruh positif serta fragmentasi politik berpengaruh terhadap inisiatif *open government* pemerintah daerah serta fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap inisiatif *open government*. Hasil penelitian ini juga mendukung teori institusional yang menjelaskan bahwa suatu organisasi yang berada diruang lingkup yang hampir sama akan memiliki karakteristik yang serupa. Sementara itu, hasil uji variabel lain menunjukkan hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muñoz dkk. (2022) dan Sáez-Martín dkk. (2021). Hasil ini nampaknya disebabkan oleh perbedaan regulasi serta kondisi wilayah yang diteliti. Kesadaran akan hak mendapatkan informasi publik serta minat masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi melalui situs resmi pemerintah daerah tampaknya masih kurang.

Hal ini dapat dilihat dari total pengunjung website resmi pemerintah daerah melalui situs similarwe.com. Situs ini merupakan sebuah layanan yang menyediakan analitik data untuk beberapa website dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data pengguna, situs, dan jaringan untuk melakukan triangulasi data (Jansen et al., 2022). Dari sisi pemerintah, komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip *open government* juga masih kurang ditandai dengan kurangnya penyediaan kemudahan akses situs resmi pemerintah daerah. Khurshid dkk.(2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemudahan akses dapat mempengaruhi intensi untuk menggunakan *open government*. Sementara itu, hasil pemeringkatan e-government Development Index tahun 2022 yang dilaksanakan salah satunya berdasarkan kemudahan akses pelayanan menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 77 dari 193 neegara (United Nations, 2022).

## **SIMPULAN**

Hasil dalam penelitian ini memberikan gambaran sejauh mana implikasi *open government* di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas akses data informasi publik sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat dikawal atau dipantau dengan mudah oleh masyarakat sehingga apabila terindikasi kecurangan atau *fraud* di dalamnya, maka akan lebih mudah dilaporkan dan diselidiki. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak yang dibayar masyarakat berpengaruh positif terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses di situs *open government*. Sementara itu, fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses di situs *open government*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2016). Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. *SAGE Journals*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>

- Bawaslu Manado. (2019, April 7). *Berikut Partai Politik Peserta Pemilu*. <https://manado.bawaslu.go.id/2019/04/07/berikut-partai-politik-peserta-pemilu/>
- Diefendorff, J. M., & Seaton, G. A. (2015). Work Motivation. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 680–686. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.22036-9>
- Glaeser, E. L., & Gottlieb, J. D. (2016). Urban Resurgence and the Consumer City. *SAGE Journals*, 43(8), 1275–1299. <https://doi.org/10.1080/00420980600775683>
- Homsy, G. C., & Warner, M. E. (2014). Cities and Sustainability: Polycentric Action and Multilevel Governance. *Urban Affairs Review*, 51(1), 46–73. <https://doi.org/10.1177/1078087414530545>
- Jansen, B. J., Jung, S. G., & Salminen, J. (2022). Measuring user interactions with websites: A comparison of two industry standard analytics approaches using data of 86 websites. *PLoS ONE*, 17(5 May). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268212>
- Jochimsen, B., & Thomasius, S. (2014). The perfect finance minister: Whom to appoint as finance minister to balance the budget. *European Journal of Political Economy*, 34, 390–408. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2013.11.002>
- Karina, D. P., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87–100. <https://doi.org/10.24269/ISO.V3I2.291>
- Khurshid, M. M., Zakaria, N. H., Arfeen, M. I., Rashid, A., Nasir, S. U., & Shehzad, H. M. F. (2022). Factors Influencing Citizens' Intention to Use Open Government Data—A Case Study of Pakistan. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.3390/BDCC6010031/S1>
- Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional Dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/157/106>
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2015). Breaking the Rules: A Historical Overview of Goal-Setting Theory. *Advances in Motivation Science*, 2, 99–126. <https://doi.org/10.1016/BS.ADMS.2015.05.001>
- Luthfia, A. R., Nada, E., Alkhajar, S., & Sofyan, A. (2021). Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (Open Government) di Indonesia. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*, 73(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/wahana.v73i2.4269>
- Marthasari, G. I., & Ismadianti, G. (2020). Evaluasi Kinerja Web Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Dan Rekayasa (SENTRA) 2020*, 214–219. <https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi->
- Muñoz, L. A., Bolívar, M. P. R., & Villamayor Arellano, C. L. (2022). Factors in the adoption of open government initiatives in Spanish local governments. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101743>
- OECD. (2016). *OECD Kajian Open Government: Hal-Hal Pokok*. <https://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf>
- Perdana, P. P. (2018). Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetensi Politik, Opini Audit dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(1), 1–21.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5264>
- Rodríguez Bolívar, M. P. (2019). In the search for the “Smart” Source of the Citizen’s Perception of Quality of Life in European Smart Cities. *Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences*, 3325–3334.  
<https://doi.org/10.24251/HICSS.2019.401>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & López Hernández, A. M. (2013). Determinants of Financial Transparency in Government. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/10967494.2013.849169*, 16(4), 557–602.  
<https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169>
- Rose, J., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2018). Stakeholder theory for the E-government context: Framing a value-oriented normative core. *Government Information Quarterly*, 35(3), 362–374. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.06.005>
- Sáez-Martín, A., López-Hernández, A. M., & Caba-Pérez, C. (2021). Municipal size and institutional support as differential elements in the implementation of freedom of information legislation by Spanish local governments. *Public Management Review*, 23(1), 70–90. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1668466>
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459–466.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>
- Suharyani, R., Ulum, I., & Jati, A. W. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 71–92. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/8356>
- Tampubolon, E. G., & Siregar, D. A. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(2). <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/393>
- Triani, M. (2018). *Pengungkapan Informasi Anti Korupsi Pada Perbankan Syariah di Indonesia* [Tesis, Universitas Islam Indonesia].  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10798>
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022*.  
<https://publicadministration.un.org/en/>
- van der Hoek, M., Groeneveld, S., & Kuipers, B. (2018). Goal Setting in Teams: Goal Clarity and Team Performance in the Public Sector. *Review of Public Personnel Administration*, 38(4), 472–493. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682815>
- Yuhertiana, I., Arif, L., Akbar, F. S., Puspitasari, D. S., & Popoola. Oluwatoyin Muse Johnson. (2020). Government Internet Financial Reporting in the African Countries. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 2077–2085. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10732>
- Yuhertiana, I., Bastian, I., & Sari, Ri. P. (2019). Financial Information and Voter’s Decisions on Local Government Elections. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(9), 245–261.  
[https://www.ijicc.net/images/Vol6Iss9/6916\\_Yuhertiana\\_2019\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol6Iss9/6916_Yuhertiana_2019_E_R.pdf)